

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya telah rampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa untuk melaksanakan secara bertahap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan memperhatikan seluruh aspek strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK.

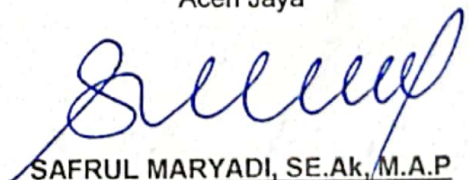
Perkembangan konsepsivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) akan sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan SKPK berdasarkan Renstra dan Program Tahunan SKPK, sebagai wujud pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan efektif serta transparan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Akhirnya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diharapkan lebih aktif dan motivatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan target yang akan dicapai.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami menyadari masih banyak kekurangan maka kami sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Calang, Juli 2020

f Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Jaya



SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P

Pembina Tk. I

Nip 19720327 200212 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKKTAHUN LALU	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Renstra Capaian BPKK.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BPKK	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK.....	 24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKK	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	25
 BAB V PENUTUP	 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini RKPK dan Renja SKPK.

Perencanaan berdasarkan visi, misi, serta kebijakan dan program kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMN yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja SKPK mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPK menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPK) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Renja BPKK merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKK serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BPKK. Renja BPKK Aceh Jaya Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Renstra BPKK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang memuat estimasi pelaksanaan Tahun 2020 serta rencana program dan kegiatan tahun 2021 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
- 24) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- 25) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;
- 26) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
- 27) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud disusunnya Renja BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, antara lain yaitu untuk:

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan pelaksanaan perencanaan sesuai dengan Renstra dan RPJM.
- f. Memuat penjabaran dari seluruh rencana kerja dari program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk jangka waktu periode I (satu) tahun kedepan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi BPKK Aceh Jaya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan dari penyusunan Renja BPKK Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah sebagai pedoman/acuan didalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKK

- a. Menetapkan program/kegiatan pembangunan pada BPKK Aceh Jaya selama I (satu) tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- d. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Renja BPKK Aceh Jaya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Renja BPKK adalah sebagai berikut:

Bab I	: Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan Rencana Kerja
Bab II	: Hasil Evaluasi Renja BPKK Tahun Lalu
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKK
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BPKK
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPK
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	: Tujuan dan Sasaran Renja BPKK Aceh Jaya
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BPKK
3.3	Program dan Kegiatan
Bab IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan BPKK
Bab IV	: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPK dalam melaksanakan program kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini didasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA – SKPK tahun berjalan yang sudah beberapa bulan dilaksanakan

Pencapaian target kinerja APBK dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki 2 sasaran yaitu: (1). meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, dan (2). meningkatnya akuntabilitas keuangan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun 2019 Kabupaten Aceh Jaya terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKK dan
Pencapaian Renstra BPKK s/d Tahun 2020
Kabupaten Aceh Jaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+9)	11 (10/4)	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
4 04	Bidang Keuangan										
4 04 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60.00 %	
4 04 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik, kawat/faxsimile/ internet/TV kabel	60 bln	60 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	84 bln	140.00 %	
4 04 05 01 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas	4 unit		2 unit			3 unit	3 unit	75.00 %	
4 04 05 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	90 unit	300.00 %	
4 04 05 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	15 orang	300.00 %	
4 04 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	43 jenis	38 jenis	38 jenis	38 jenis	100	43 jenis	119 jenis	276.74 %	
4 04 05 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	516884 lbr	10 lbr	117,142 lbr	42857 lbr	37	117,142 lbr	160,009 lbr	30.96 %	
4 04 05 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	30 jenis	300.00 %	
4 04 05 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	3 jenis	300.00 %	
4 04 05 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu	330 kali	394 kali	50 kali	73 kali	146	50 kali	517 kali	156.67 %	
4 04 05 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	943 kali	576 kali	317 kali	144 kali	45	184 kali	904 kali	95.86 %	
4 04 05 01 01 19	Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	28 orang	23 orang	32 orang	23 orang	72	32 orang	78 orang	278.57 %	
4 04 05 01 01 20	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	10 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	5 kali	50.00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Taget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+9)	11 (10/4)	12
4 04 05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan terhadap sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	20 %	20 %	100	20 %	60	60.00	
4 04 05 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	73 unit	39 unit	15 unit	4 unit	27	2 unit	45 unit	61.64 %	
4 04 05 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	73 unit	196 unit	10 unit	19 unit	190	29 unit	244 unit	334.25 %	
4 04 05 01 02 10	Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	76 unit	152 unit	20 unit	7 unit	35	8 unit	167 unit	219.74 %	
4 04 05 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 jenis	60 jenis	20 jenis	10 jenis	50	20 jenis	90 jenis	150.00 %	
4 04 05 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit	2 unit	4 unit	2 unit	50	4 unit	8 unit	200.00 %	
4 04 05 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	150 unit	48 unit	12 unit	12 unit	100	45 unit	105 unit	70.00 %	
4 04 05 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	300.00 %	
4 04 05 01 02 44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	415 unit	48 unit	85 unit	12 unit	14	40 unit	100 unit	24.10 %	
4 04 05 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	66,30				60,20		62,70	62.70 %	
4 04 05 01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 06 06	Penyusunan pelaporan keuangan dana desa	Jumlah laporan	5 laporan	- laporan	- laporan			- laporan	- laporan	- %	
4 04 05 01 06 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan	2 laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	100.00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+9)	11 (10/4)	12
4 04 05 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Opini BPK	100 %		100 %	100 %	100		100 %	100.00 %	
4 04 05 01 17 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah laporan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	150.00 %	
4 04 05 01 17 04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan	5 laporan	1 dok	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK	Jumlah laporan	15 laporan	3 dok	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK	Jumlah laporan	10 laporan	2 dok	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK	Jumlah laporan	15 laporan	3 dok	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBK	Jumlah laporan	10 laporan	2 dok	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jumlah laporan	15 laporan	3 dok	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jumlah laporan	15 laporan	3 dok	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sosialisasi	18 kali	2 kali	4 kali			4 kali	6 kali	33.33 %	
4 04 05 01 17 40	Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengajuan Pembayaran Keuangan Daerah	Jumlah laporan	2 laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	100.00 %	
4 04 05 01 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Jumlah laporan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 20	Peningkatan Pelayanan SIM Penggajian Daerah Otonom	Jumlah aparatur	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100.00 %	
4 04 05 01 17 21	Peningkatan Pelayanan SIMDA Keuangan	Jumlah sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	100	1 sistem	1 sistem	100.00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+9)	11 (10/4)	12
4 04 05 01 17 28	Penyusunan Standar Penyusunan Rencana Anggaran dan SAB	Jumlah laporan	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	40.00 %	
4 04 05 01 17 33	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan	5 laporan		1 laporan			1 laporan	1 laporan	20.00 %	
4 04 05 01 17 36	Pemutakhiran Database Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 17 37	Pengendalian dan Pengawasan Objek Pajak	Jumlah laporan	20 kali	4 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	8 kali	40.00 %	
4 04 05 01 17 41	Penilaian Aset Daerah	Jumlah laporan	5 laporan		1 laporan			1 laporan	1 laporan	20.00 %	
4 04 05 01 17 42	Penerbitan Aset Daerah	Jumlah laporan	5 laporan		1 laporan			1 laporan	1 laporan	20.00 %	
4 04 05 01 17 43	Penyusunan Laporan Aset Daerah Berbasis Database	Jumlah laporan	15 laporan		1 laporan			1 laporan	1 laporan	6.67 %	
4 04 05 01 17 45	Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan PAD	Jumlah rancangan qanun pengelolaan PAD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	40.00 %	
4 04 05 01 17 51	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong	Jumlah gampong	172 gampong		172 gampong	172 gampong	100	172 gampong	172 gampong	100.00 %	
4 04 05 01 17 52	Peningkatan Pelayanan Keuangan Gampong	Jumlah gampong	172 gampong		172 gampong	172 gampong	100	172 gampong	172 gampong	100.00 %	
4 04 05 01 17 53	Implementasi E-Budgeting	Jumlah tenaga Asistensi Implementasi	3 orang		3 orang			3 orang	3 orang	100.00 %	
4 04 05 01 17 54	Penyusunan Identifikasi Aset Gampong (identifikasi, kondisi, keberadaan dan rencana tindak lanjut)	Jumlah laporan	5 laporan		1 laporan			1 laporan	1 laporan	20.00 %	
4 04 05 01 17 61	Pelaporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan	60 laporan		12 laporan			12 laporan	12 laporan	20.00 %	
4 04 05 01 17 62	Pendataan dan Pemetaan Objek PBB - P2	Jumlah laporan	2500 WP	650 WP	500 WP	500 WP	100	500 WP	1,650 WP	66.00 %	
4 04 05 01 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan	100 %	20 %	20	20	100	20	60 %	60.00 %	
1 20 05 01 20 09	Operasional Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	jumlah laporan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60.00 %	
4 04 05 01 20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase terlaksananya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah	100 %	20 %	20 %	20 %	100	20 %	60 %	60.00 %	
1 20 05 01 20 09	Publikasi Informasi Keuangan Daerah	jumlah laporan	8 jenis		8 jenis			8 jenis	8 jenis	100.00 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- d. Pembinaan UPTB; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban APBK. Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terhadap 3 indikator kinerja tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aaceh Jaya

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target renstra perangkat daerah					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Peningkatan pendapatan asli daerah Aceh Jaya		27,34	16,34	19,34	21,34	24,34	27,34	11,45	21,34	24,34	27,34	
3	Ketepatan waktu penetapan APBK			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	

Pencapaian indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 yang diaudit BPK RI pada Tahun 2020 telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor: 19.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 yang diterima pada 24 Mei 2019 sesuai yang ditargetkan dalam Perjajian Kinerja Tahun 2019, dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan :
 - 1). Penyusunan Standar Satuan Harga
 - 2). Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBK
 - 4). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
 - 5). Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah Otonom
 - 6). Peningkatan Pelayanan SIMDA Keuangan
 - 7). Penyusunan Standar Penyusunan Rencana Anggaran dan SAB
 - 8). Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pembayaran Keuangan Daerah
 - 9). Penilaian Aset daerah
 - 10). Penertiban Aset Daerah
 - 11). Penyusunan Laporan Aset Daerah Berbasis Database
 - 13). Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
 - 14). Peningkatan Pelayanan Keuangan Gampong
 - 15). Penyusunan Identifikasi Aset Gampong (inventarisasi, kondisi, keberadaan dan rencana tindak lanjut)
 - 16). Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peningkatan pendapatan asli daerah Aceh Jaya yang tidak sesuai target disebabkan karena pengalihan dana OTSUS dari pengelolaan pada masing-masing pemerintah kabupaten kembali ke Pemerintah Provinsi, pengalihan dana OTSUS telah menyebabkan penurunan jumlah infaq, shadaqah dan bunga dari pengelolaan kas dan beberapa objek penerimaan lainnya, dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan :
 - 1). Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

- 2). Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah
 - 3). Pemutakhiran Database Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
 - 4). Pengendalian dan Pengawasan Objek Pajak
 - 5). Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan PAD
 - 6). Pelaporan Bulanan Realiasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah
 - 7). Pendataan dan Pemetaan Objek PBB-P2
 - 8). Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2
- Tahapan penyusunan anggaran sudah memenuhi target yang direncanakan dimana Penetapan Qanun APBK Tahun 2020 sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu tepat waktu dimana realisasinya pada tanggal 30 Desember 2019. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan:
- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK
 - 2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK
 - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK
 - 4) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK
 - 5) Implementasi E-Budgeting

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BPKK

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKK Aceh Jaya. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKK Aceh Jaya untuk tahun 2017 – 2022.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK selaku salah satu satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu:

- a. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
- b. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
- c. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal;

- e. Belum seluruhnya proses operasional memiliki prosedur operasional baku (*Standar Operating Procedure*);
- f. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPK yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBK dengan dokumen perencanaan daerah;
- g. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- h. Pengembangan aset belum seluruhnya diatribusikan ke aset induk;
- i. Belum seluruhnya dilakukan pendataan ulang terhadap WP PBB P2;
- j. Belum adanya data base WP dan WR;
- k. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- l. Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- m. Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih belum cukup; dan
- n. Kurangnya komitmen pimpinan SKPK terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif;
5. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;
6. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

7. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan

b. Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, sedangkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
2. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah SKPK;
4. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkatnya intensitas;
5. Masih adanya aset di SKPK yang belum dioptimalkan;
6. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran program/kegiatan;
8. Adanya tanah milik daerah namun bangunan di atasnya merupakan bangunan yang dibangun dari sumber pembiayaan diluar APBD dan belum diserahterimakan ke daerah;
9. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
10. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum diserahkan;
11. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ; dan
12. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan

- prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertical; dan
 - e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset dinas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK

Perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, namun akibat keterbatasan dana dan anggaran yang tersedia tidak semua program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) dapat terealisasi.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPK dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPK, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPK berdasarkan rancangan awal RKPK.

Review terhadap rancangan awal RKPK, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja BPKK ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKK. Perumusan rancangan awal Renja BPKK dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada BPKK, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun lalu berdasarkan Renstra BPKK, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK, Telaahan terhadap rancangan awal RKPK, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKK,

penyempurnaan rancangan Renja BPKK, pembahasan forum SKPK; dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam prosesnya juga diperbandingkan antara program-program yang sudah dituangkan dalam RKPK dengan hasil analisa kebutuhan yang didasarkan pada plafon dan prioritas anggaran. Hasil review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2021 tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.4
Revisi terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2021
Kabupaten Aceh Jaya

No	Rancangan Awal RKPK						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)		
	KEUANGAN				6,161,107,748		KEUANGAN				3,998,345,446		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisiplinan ASN		4,544,553,098		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisiplinan ASN		2,282,571,646		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000		
01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	1	Dokumen		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	1	Dokumen	5,000,000	
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Tersedianya buku data base (dokumen)	1	Dokumen		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Tersedianya buku data base (dokumen)	1	Dokumen	5,000,000	
05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Dokumen LAKIP	1	Dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Dokumen LAKIP	1	Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Keuangan						Administrasi Keuangan				66,000,000		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Jaya	Jumlah ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Jaya	Jumlah ASN				
06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	20,000,000	
07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	46,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	46,000,000	
	Administrasi Umum		Persentase realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran				Administrasi Umum		Persentase realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		2,201,571,646		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Aceh Jaya	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet	12	bulan	230,673,416	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Aceh Jaya	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet	12	bulan	190,673,416	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah kendaraan dinas	30	unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah kendaraan dinas	30	unit	25,000,000	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Tenaga Harian Lepas	32	orang	560,763,982	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Tenaga Harian Lepas	32	orang	500,763,982	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah tenaga kebersihan	5	orang	136,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah tenaga kebersihan	5	orang	68,365,900	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah ATK	43	jenis	101,536,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah ATK	43	jenis	65,000,000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah penggandaan	1E+05	lembar	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah penggandaan	100000	lembar	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)		
	KEUANGAN					6,161,107,748	KEUANGAN					3,998,345,446	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah alat listrik dan elektronik	10	jenis	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah alat listrik dan elektronik	10	jenis	8,000,000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah bahan bacaan	1	jenis	1,080,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Aceh Jaya	Jumlah bahan bacaan	1	jenis	1,080,000	
16	Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Pameran Pembangunan	1	kali	20,000,000	Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah Pameran Pembangunan	1	kali	20,000,000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Aceh Jaya	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu	50	kali	19,591,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Aceh Jaya	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu	50	kali	19,591,000	
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	184	kali	545,478,700	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	184	kali	400,000,000	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1	unit	797,709,500	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1	unit	340,000,000	
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	unit	272,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	unit	30,000,000	
24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13	unit	114,806,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13	unit	50,000,000	
25	Pengadaan Mebeleur	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan mebeleur	32	unit	208,766,000	Pengadaan Mebeleur	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pengadaan mebeleur	32	unit	25,000,000	
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	1	unit	115,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	1	unit	40,000,000	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	4	unit	94,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	4	unit	50,000,000	
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	45	unit	63,348,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	45	unit	60,000,000	
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1	unit	480,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kab. Aceh Jaya	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1	unit	118,097,348	
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	78	unit	515,700,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Aceh Jaya	Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	78	unit	150,000,000	
	Peningkatan Dislpihn dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat kedisiplinan				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat kedisiplinan			-	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	80	pasang	149,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	80	pasang	-	
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	80	pasang	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	80	pasang	-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1,439,901,150	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1,140,305,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					623,946,300	
01	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	2	dok	85,642,000	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	2	dok	65,642,000	
02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	2	dok	55,000,000	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	2	dok	45,000,000	
03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	88	dok	50,000,000	Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dokumen	88	dok	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)		
	KEUANGAN					6,161,107,748	KEUANGAN					3,998,345,446	
04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	88	laporan	50,000,000	Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	88	laporan	40,000,000	
05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	5	laporan	57,835,000	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	5	laporan	195,897,250	
06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	5	laporan	58,546,400	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	5	laporan	210,542,800	
08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	26,864,250	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	26,864,250	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					238,668,000	
03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Aceh Jaya	Jumlah koordinasi	9	kali	55,000,000	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Aceh Jaya	Jumlah koordinasi	9	kali	40,000,000	
04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok SP2D	11620	dok	90,796,000	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok SP2D	11620	dok	60,000,000	
05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	930	dok	63,000,000	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	930	dok	53,000,000	
09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	2	dok	60,668,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	2	dok	60,668,000	
10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	728	dok	30,000,000	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Aceh Jaya	Jumlah dok	728	dok	25,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					219,225,000	
04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	3	laporan	53,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	3	laporan	53,000,000	
05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	3	laporan	137,025,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	3	laporan	134,025,000	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	32,200,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	32,200,000	
	Kegiatan Penunjang Urusan						Kegiatan Penunjang Urusan					58,466,000	
03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	58,466,000	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	58,466,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					418,425,000	

No	Rancangan Awal RKPK						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatlf (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)			
	KEUANGAN					6,161,107,748	KEUANGAN					3,998,345,446		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah						Pengelolaan Barang Milik Daerah					418,425,000		
01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	40,425,000	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	73,425,000	
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	3	laporan	80,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	3	laporan	70,000,000	
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	97,033,500	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	75,000,000	
07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah pelaksanaan koordinasi	12	kali	150,400,000	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah pelaksanaan koordinasi	12	kali	150,000,000	
08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	105,000,000	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	50,000,000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					176,653,500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					157,043,500		
	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian danEvaluasi Pendapatan Daerah						Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian danEvaluasi Pendapatan Daerah					157,043,500		
01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	84,210,000	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	35,000,000	
02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	21,000,000	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	35,500,000	
04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	23,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	23,000,000	
06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	33,443,500	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	33,443,500	
11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Jaya	Aceh	Jumlah laporan	1	laporan	15,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Aceh Jaya	Jumlah laporan	1	laporan	30,100,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya tidak menampung usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPK lain.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

BPKK Aceh Jaya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH JAYA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan APBK. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah dibidang keuangan maka pada tiap tahunnya tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional.

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	NIHIL		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi ril dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap kelanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPKK Aceh Jaya yaitu :

1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan keuangan SKPK.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
5. Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran.
6. Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra terdiri dari 4 (empat) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 3.998.345.446,00. Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.2.282.571.646,-. Kegiatannya yaitu:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan, terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

3) Administrasi Umum, terdiri dari 20 sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Mebeleur
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
20. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.1.140.305.300,-. Kegiatannya yaitu:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 8 sub kegiatan:

- 1 Penyusunan KUA dan PPAS

2. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD
 4. Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD
 5. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 6. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 7. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
 8. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:
1. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 2. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
 3. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
 4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
 5. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
 3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4) Kegiatan Penunjang Urusan, terdiri dari 1 sub kegiatan:
1. Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

c) Prgram Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.418.425.000,-. Kegiatannya yaitu:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:
 1. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 4. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
 5. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

d) Prgram Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.157.043.500,-. Kegiatannya yaitu:

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:
 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 2. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 3. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 4. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
 5. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya seperti yang tercantum pada tabel 3.3.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					KEUANGAN				3,998,345,446				7,673,288,998
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisiplinan ASN			2,282,571,646				5,194,528,998
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,282,571,646				5,194,528,998
5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000				15,000,000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Calang	1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya buku data base (dokumen)		1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP		1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan				66,000,000				101,000,000
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		61 orang				61 orang	
5	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		1 laporan	20,000,000	DAU		1 laporan	55,000,000
5	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan		1 laporan	46,000,000	DAU		1 laporan	46,000,000
		01	2.03		Administrasi Umum	Persentase realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran			2,201,571,646				5,078,528,998
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet		12 bulan	190,673,416	DAU		12 bulan	230,673,416
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas		30 unit	25,000,000	DAU		30 unit	25,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Harian Lepas		32 orang	500,763,982	DAU		32 orang	560,763,982
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan		5 orang	68,365,900	DAU		5 orang	68,365,900
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		43 jenis	65,000,000	DAU		43 jenis	101,837,000
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan		117142 lembar	40,000,000	DAU		117142 lembar	45,000,000
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik		10 jenis	8,000,000	DAU		10 jenis	8,000,000
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan		1 jenis	1,080,000	DAU		1 jenis	1,080,000
5	02	01	2.03	16	Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pameran Pembangunan		1 kali	20,000,000	DAU		1 kali	20,000,000
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu		50 kali	19,591,000	DAU		50 kali	25,000,000
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah		184 kali	400,000,000	DAU		184 kali	545,478,700
5	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		1 unit	340,000,000	DAU		1 unit	797,709,500
5	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		12 unit	30,000,000	DAU		12 unit	557,000,000
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		13 unit	50,000,000	DAU		13 unit	114,806,000
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur		32 unit	25,000,000	DAU		32 unit	208,766,000
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		1 unit	40,000,000	DAU		1 unit	115,000,000
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		4 unit	50,000,000	DAU		4 unit	100,000,000
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		45 unit	60,000,000	DAU		45 unit	158,348,500
5	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor		1 unit	118,097,348	DAU		1 unit	880,000,000
5	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional		78 unit	150,000,000	DAU		78 unit	515,700,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan			1,140,305,300				1,416,901,300
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				623,946,300				836,946,300
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen		2 dokumen	65,642,000	DAU		2 dokumen	88,642,000
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen		2 dokumen	45,000,000	DAU		2 dokumen	55,000,000
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen		88 dokumen	40,000,000	DAU		88 dokumen	50,000,000
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	Jumlah laporan		88 dokumen	40,000,000	DAU		88 dokumen	50,000,000
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah laporan		5 laporan	195,897,250	DAU		5 laporan	276,897,250
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah laporan		5 laporan	210,542,800	DAU		5 laporan	289,542,800
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah laporan		1 laporan	26,864,250	DAU		1 laporan	26,864,250
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				238,668,000				299,464,000
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi		9 kali	40,000,000	DAU		9 kali	55,000,000
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah dok SP2D		11620 dokumen	60,000,000	DAU		11620 dokumen	90,796,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah dok		930 dokumen	53,000,000	DAU		930 dokumen	63,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dok		2 dokumen	60,668,000	DAU		2 dokumen	60,668,000
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dok		728 dokumen	25,000,000	DAU		728 dokumen	30,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				219,225,000				222,025,000
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan		3 laporan	53,000,000	DAU		3 laporan	53,000,000
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan		3 laporan	134,025,000	DAU		3 laporan	137,025,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	32,200,000	DAU		1 laporan	32,000,000
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan				58,466,000				58,466,000
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah laporan		1 laporan	58,466,000	DAU		1 laporan	58,466,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				418,425,000				682,310,500
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				418,425,000				682,310,500
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah laporan		1 laporan	73,425,000	DAU		1 laporan	73,425,000
5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	30,000,000	DAU		1 laporan	35,000,000
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	40,000,000	DAU		1 laporan	50,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/ Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	35,000,000	DAU		1 laporan	40,000,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	60,000,000	DAU		1 laporan	193,485,500
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi		50 dokumen	60,000,000	DAU		12 kali	130,000,000
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	40,000,000	DAU		1 laporan	50,000,000
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		40 laporan	30,000,000			40 laporan	30,400,000
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen		100 dokumen	25,000,000			100 dokumen	30,000,000
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		3 laporan	25,000,000			3 laporan	50,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pedapatan Asli Daerah Aceh Jaya			157,043,500				379,548,200
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah				157,043,500				379,548,200
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	35,000,000	DAU		1 laporan	242,448,200
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	15,500,000	DAU		1 laporan	24,000,000
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	23,000,000	DAU		1 laporan	23,000,000
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	33,443,500	DAU		1 laporan	30,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan			20,000,000			1 laporan	30,000,000
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	30,100,000	DAU		1 laporan	30,100,000

BAB IV

PENUTUP

Renja BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017–2022. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik.

Seluruh rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan dokumen pendukung pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Aparatur, sumber pendanaannya serta komitmen antara pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

Renja BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. Demikian semoga Renja BPKK Aceh Jaya ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya.

Calang, Juli 2020
§ Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten §
Aceh Jaya



SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19720327 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya
Telp/Fax. (0654) 002210251, Email: bppk.acehjaya@gmail.com Kode Pos 23654

CALANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

ACEH JAYA

TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyajian Rancangan Rencana Kerja SKPK;
- b. bahwa untuk menyelaraskan program kegiatan dengan penganggaran masa 1 (satu) tahun kedepan diwujudkan dalam Penyusunan Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dirasa perlu adanya Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.

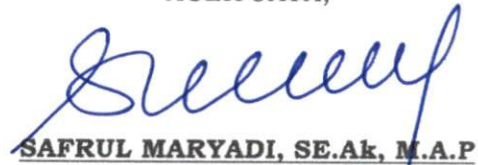
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang
pada tanggal : 16 JULI 2020 M
25 DZULQAI'DAH 1441 H

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH JAYA,


SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 19720327 200212 1 003

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKK ACEH JAYA
 NOMOR : Tahun 2020
 TANGGAL : 16 JULI 2020M
 25 DZULQAI'DAH 1441H

PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENJA
 BPKK ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
a	Tim Koordinasi	
1	Kepala BPKK	Ketua
2	Sekretaris BPKK	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pendapatan	Anggota
4	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5	Kepala Bidang Aset	Anggota
6	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
b	Tim Penyusun	
1	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusun
2	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Penyusun
3	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusun
4	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Penyusun

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
 ACEH JAYA,


SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720327 200212 1 003